



KLIPING

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sumber Berita: **RADAR TARAKAN**

TANGGAL:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				v																										

BULAN:

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
					v						

TAHUN

2015

HALAMAN

2b

BPK Kaltara Apresiasi Kinerja Pembkab

TARAKAN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Malinau atas prestasi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pembkab Malinau dinilai telah mencapai opini terbaik setelah bertahun-tahun melewati masa-masa pahit dengan hanya memperoleh opini *disclaimer* dan wajar dengan pengecualian (WDP). Hampir 10 tahun BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, pencapaian atas laporan LKPD 2013 baru diraih 153 pemda dari 524 pemda di seluruh tanah air.

"Atas pencapaian prestasi tersebut kami atas nama BPK RI mengucapkan selamat dan berharap agar upaya-upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Malinau terus ditingkatkan," ujar Kepala Perwakilan BPK RI Kalimantan Utara Ade



AGUSSALAM SANIP / RADAR TARAKAN

DIAPRESIASI : Bupati Malinau Dr Yansen TP MSI didampingi Ketua DPRD Wempi W. Mawa SE saat menerima hasil penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Kaltara, Ade Irwan Ruswana, di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara, Kamis (4/6).

Irwan Ruswana dalam sambutannya.

Ya, BPK RI masih memberikan catatan yang harus diperhatikan Pemkab Malinau atas hasil WTP dengan paragraf penjelas (dilengkapi beberapa catatan, *Red.*). Di antaranya masih terkait penyelesaian aset-aset milik Pemkab Malinau. Dicontohkan, seperti tahun 2012, ditemukan pencatatan aset yang kurang teliti yang bersumber dari dana BOS, karena tercatat masih gelondongan.

Temuan tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga ke depan tidak ditemukan lagi hal-hal seperti itu. Sebab, jika hal tersebut dibiarkan terus-menerus bisa menimbulkan persoalan baru yang bisa berdampak ke jalur hukum.

Selain itu, BPK juga menyoroti soal penyelesaian aset tanah yang selalu menjadi alasan sulitnya meraih WTP karena susah dalam pendataannya dan rawan diserobot serta rawan hilang. Karena itu,

BPK mengharapkan di tahun berjalan, aset-aset seperti ini bisa lebih terpantau dan terdeteksi sehingga tetap menjadi aset prioritas pemda. Selain itu, Ade Irwan Ruswana juga menyinggung persoalan dana hibah yang perlu mendapat pengawasan ketat pemerintah daerah.

Bupati Malinau Dr Yansen TP MSI mengakui, persoalan aset memang menjadi pekerjaan paling sulit dalam menyusun laporan keuangan. Namun, pihaknya sudah berupaya membenahi pengelolaan aset dengan cara melakukan sensus aset. "Kami melakukan sensus dengan membentuk tim mulai 2013, 2014 dan kami sampai pada tingkat nilai tadi," kata bupati kepada sejumlah media usai acara kemarin.

Mengenai persoalan dana hibah, bupati mengungkapkan bahwa persoalan ini juga menjadi tanggung jawab Pemkab Malinau, termasuk bagaimana menyadarkan masyarakat selaku pengguna dana hibah, bahwa masyarakat juga punya tanggung jawab. Bahkan, ke depan, Pemkab akan tegas kepada masyarakat yang bandel terhadap pertanggungjawaban dana hibah. "Kalau sudah bandel menerima dana hibah, tidak usah dikasih lagi, supaya jangan terbebani kinerja daerah yang kurang bagus. Saya kira dengan pengalaman menjalani pengelolaan keuangan yang diikuti setiap tahun, bisa meminimalisir persoalan-persoalan," jelas bupati. (raj/ash)